



Judul : Parlemen Minim Komitmen RUU PPRT Terlunta-lunta
Tanggal : Jumat, 20 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Parlemen Minim Komitmen RUU PPRT Terlunta-lunta

PENYELESAIAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang terlunta-lunta hingga 19 tahun dinilai sebagai bukti minimnya komitmen DPR sebagai pemegang inisiatif RUU tersebut.

Karena itu, sejumlah pihak mendorong DPR agar segera menyetujui RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR sehingga dapat dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar RUU PPRT diselesaikan tahun ini. Kehadiran RUU akan memberikan perlindungan bagi para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur kerja rumah tangga.

Komnas HAM, salah satu yang mendorong percepatan penyelesaian RUU PPRT, meminta DPR dan pemerin-

tah mempertimbangkan hasil kajian Komnas HAM sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RUU tersebut.

Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah menjelaskan, pada 2021, pihaknya mengkaji dan meneliti urgensi dari ratifikasi konvensi International Labor Organization (ILO) 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan urgensi pengesahan RUU PPRT.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM berkesimpulan ratifikasi konvensi ILO 189 dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT. "Ratifikasi konvensi itu dapat menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT," tutur Anis, kemarin.

Senapas dengan itu, Wakil

Ketua Baleg Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menginginkan RUU PPRT bisa segera disahkan. Menurutnya, NasDem memiliki kepentingan yang sama dengan Presiden soal pengesahan RUU PPRT. "Kita harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan Presiden," ujar Willy.

Ia menambahkan semestinya semua partai koalisi saat ini memiliki pandangan yang sama terhadap keinginan pemerintah mempercepat pengesahan RUU PPRT.

Sedikit berbeda, Ketua DPR Puan Maharani menyebut enggan terburu-buru membahas bakal beleid tersebut. Alasannya, ia ingin produk yang dihasilkan berkualitas.

"Kami mengedepankan pembahasan undang-undang secara berkualitas," kata Puan, kemarin. (Ind/Uta/Atm/X-12)